



► LINGKUNGAN HIDUP

TPSS Pandansari Sudah Miliki Izin

BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul mengelaim pembangunan dan pengoperasionalan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Pandansari telah melalui kajian dan telah mendapatkan izin dari Panitikismo.

Selain itu, TPSS dengan luasan 1.000 meter persegi itu hanya beroperasi sampai hari ini [30 Desember 2024] dan tidak akan mencemari biota dan lingkungan sekitar.

"TPSS Pandansari itu adalah solusi untuk menampung sampah sementara dalam kondisi darurat sampah di Bantul. Sebelumnya, kami telah melakukan kajian dengan memperhatikan aspek lingkungan dan urgenitas lainnya," ujar Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, Senin (30/12).

Selain itu, Bambang menyatakan sebelum dibangun dan dioperasionalkan, DLH telah meminta izin kepada Panitikismo. Sebab, lahan yang digunakan tersebut berstatus *Sultan Grond*. Adapun estimasi sampah yang bisa ditampung di tempat tersebut adalah 80 ton.

TPSS Pandansari tersebut hanya

TPSS Pandansari tersebut hanya dipergunakan selayaknya depo sampah sebagai penitipan pembuangan sampah dalam pengoperasionalannya. Selain itu, Bambang menyatakan DLH telah menggunakan metode yang aman untuk pengoperasionalan TPSS Pandansari. Dimana, lahan untuk TPSS Pandansari dibuat cekungan dan dilapisi membran dan langsung diuruk setelah sampah dibuang di tempat tersebut.

"Ini dilakukan untuk menghindari pencemaran air, lalat dan bau. Kami gunakan lapisan geomembran. Agar diketahui, selanjutnya sampah tersebut nanti akan diambil kembali untuk diolah dan didaur ulang yang outputnya nanti dapat berupa kompos yg bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutur Bambang.

Selain itu, sampah di TPSS Pandansari, akan diolah menjadi keripik bahan bakar atau RDF (Refuse Derivide Fuel) yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar bagi perusahaan Industri pembuatan semen.

Kepala Divisi Kampanye Walhi Jogja Elki Setiyo Hadi mengkhawatirkan TPSS Pandansari akan mengganggu lingkungan. Apalagi, lokasi dari TPSS Pandansari berada tidak jauh dari pantai.

"Ini berpotensi menimbulkan dampak pencemaran yang lebih besar. Harusnya ada koordinasi antarpemerintah untuk penanganan persoalan sampah," ucapnya.

(Jumali)